



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2026**



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

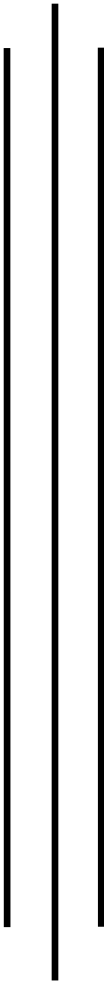
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

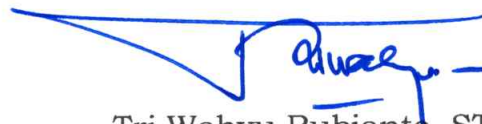
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Bappeda, maka perlu dipertimbangkan dinamika perkembangan pembangunan, baik secara politis maupun secara ekonomis. Bappeda selalu berusaha merespon tuntutan perubahan dengan terus melakukan adaptasi dan inovasi agar pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini memberi dampak yang lebih baik bagi peningkatan kinerja Bappeda Kota Batam.

Batam, 21 Agustus 2026
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Batam



Tri Wahyu Rubianto, ST., M.Si
NIP. 19760820 200212 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

 1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 4

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026..... 4

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 19

BAB IV PENUTUP 37

 4.1 Catatan Penting 37

 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 37

 4.3 Rencana Tindak Lanjut 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Kota Batam6

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 s.d. Triwulan II 15

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Bappeda 16

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.....25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1628);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1722);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

1. Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
 - Indikator Nilai Sakip PD dari target 77,03 terealisasi 75,21
 - Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD, dari target 93 terealisasi 92,24
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu, dari target 100%, teralisasi 0
 - 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, dari target 100%, terealisasi 4,48%
 - 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran, dari target 100% terealisasi 61,90%
 - 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan, dari target 100% terealisasi 31,03%
 - 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan, dari target 100% terealisasi 50%
 - 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik, dari target 100% terealisasi 32,39%
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator Persentase Keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD, dari target 100% terealisasi 0%.
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan indikator Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu, dari target 100%, terealisasi 75%
 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan, dari target 100%, terealisasi 40%
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, dari target 100%, terealisasi 50%

- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
 - indikator rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM dari target 24,03 terealisasi 20,22
 - indikator rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dari target 23,71 terealisasi 21,81
 - indikator rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang Perekonomian dan SDA dari target 22,94 terealisasi 21,37
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan indikator Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dari target 100% terealisasi 0%
 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan indikator Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA, dari target 100%, terealisasi 0%
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dari target 100% terealisasi 0%
2. Realisasi program/kegiatan **yang telah memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator Persentase Komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, dari target 100% terealisasi 100%.
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan, dari target 96,40% terealisasi 100%

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s.d. Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/kegiatan/ Subkegiatan Renja Tahun 2026	Realisasi Capaian Program/kegiatan/ Subkegiatan s.d. Triwulan II (s.d. Juni) Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Nilai Sakip PD	77,03	75,21	97,64%
	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93	92,24	99,18%
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	0,00	0,00%
1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2 dokumen	0	0,00%
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3 Laporan	0	0,00%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan: Persentase)	96,40%	100,00%	103,73%

3.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	61 orang/bulan	62	101,64%
4.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	12 Dokumen	6	50,00%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	100%	4,84%	4,84%
5.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	12 orang	3	25,00%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan: Persentase)	100%	61,90%	61,90%
6.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1 paket	0	0,00%
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	4 paket	4	100,00%
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1 paket	0	0,00%

9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2 paket	2 paket	100,00%
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	12 laporan	6 laporan	50,00%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan: Persentase)	100%	31,03%	31,03%
11. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	15 Unit	0	0,00%
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	30 unit	31	103,33%
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1 unit	0	0,00%
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan: Persentase)	100%	50%	50,00%
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12 laporan	6	50,00%

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan: Persentase)	100%	32,39%	32,39%
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	1 unit	1 unit	100,00%
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	4 unit	4 unit	100,00%
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	65 unit	17	26,15%
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	1 unit	1	100,00%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100%	99,10%	99,10%
	Persentase Komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100,00%	100,00%

8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)	100%	75,00%	75,00%
19. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Berita Acara)	45 Berita Acara	45 Berita Acara	100,00%
20. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00%
21. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
9. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)	100%	40,00%	40,00%
22. Analisis Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan: Orang)	1 Dokumen	0	0,00%
23. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan: Dokumen)	200 orang	0	0,00%

10. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100%	50,00%	50,00%
24. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	3 laporan	0	0,00%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PPM (Dengan Satuan: Nilai)	24,03	20,22	84,14%
	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Nilai)	23,71	21,81	91,99%
	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Nilai)	22,94	21,37	93,16%
11. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)	100%	0,00%	0,00%

25. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	22 dokumen	0	0,00%
26. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	0	0,00%
27. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	12 dokumen	0	0,00%
28. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	0	0,00%
12. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Persen)	100%	0,00%	0,00%

29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	14 dokumen	0	0,00%
30. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	0	0,00%
31. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	6 dokumen	0	0,00%
32. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	0	0,00%
13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Persen)	100%	0	0,00%

33. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	10 Dokumen	0	0,00%
34. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	0	0,00%
35. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	26 dokumen	0	0,00%
36. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	0	0,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjumlah Tahun 2026 berjumlah 4 (empat) indikator sasaran, dengan capaian kinerja seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 s.d. Triwulan II

No.	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100%	Persen	99,10	Persentase tersebut merupakan persentase Keselarasan RPJMD 2025-2029 dengan RKPD 2026
2	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	98,62%	Persen	100	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
3	Persentase PD yang peringkat kinerjanya sangat tinggi	Persen	40%	Persen	35,60	Perhitungan atas kinerja PD sampai dengan TW II Tahun 2026
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	90,80	Nilai	91,25	Angka sementara menggunakan nilai tahun 2025

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sampai dengan Triwulan II telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan.

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Bappeda

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Batam masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan Kota Batam yang akuntabel, efektif dan efisien.	Ketersediaan data perencanaan yang valid/akurat
			Analisa data yang belum memadai
			Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai rujukan untuk perencanaan berikutnya
			Masih kurangnya manajemen sumber daya manusia perencana yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan tantangan perencanaan pembangunan daerah
			Belum optimalnya pemanfaatan SOP dan evaluasi pelaksanaan SOP yang terkait dengan perencanaan pembangunan.
			Regulasi/kebijakan tingkat pusat yang sering berubah
			Belum optimalnya pemanfaatan kebijakan/regulasi perencanaan tingkat kota
		Masih kurangnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah kurang mempedomani dokumen perencanaan PD yang lebih tinggi.
			Belum dijalankannya SOP terkait sinkronisasi perencanaan
			Kurangnya kompetensi SDM perencana di PD dan Bappeda
			Faktor komitmen dari pimpinan perangkat daerah mitra.
			Faktor perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3, masih terdapat sejumlah isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Batam. Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ketersediaan dokumen perencanaan, tetapi juga mencakup kualitas data dan analisis, konsistensi perencanaan, pemanfaatan hasil evaluasi, kapasitas sumber daya manusia, efektivitas koordinasi antarpihak, serta kemampuan organisasi dalam merespon perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan daerah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.

1. **Fungsi perencanaan pembangunan**, yang diampu oleh **Bidang PPEPD, PPM, PSDA, dan IPW**, isu penting yang dihadapi antara lain belum optimalnya ketersediaan dan pemutakhiran data sektoral sebagai dasar penyusunan perencanaan. Data yang tersedia belum selalu memiliki tingkat

kedalaman, konsistensi, dan keterbaruan yang sama pada setiap sektor. Kondisi ini dapat menyebabkan proses analisis permasalahan dan penentuan prioritas pembangunan belum sepenuhnya didukung oleh evidence yang kuat. Selain itu, dinamika perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, perkembangan kondisi daerah, serta perubahan kebutuhan masyarakat menuntut proses perencanaan yang lebih adaptif dan responsif.

2. **Fungsi perencanaan program dan penganggaran**, yang diampu oleh **Bidang PPEPD**, isu yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan keterkaitan antara perencanaan kinerja, program, kegiatan, indikator, target, dan penganggaran. Masih diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memiliki keterkaitan yang jelas dengan permasalahan pembangunan, sasaran daerah, indikator kinerja, serta hasil yang ingin dicapai. Hal ini penting agar dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi mampu menjadi instrumen pengarah pembangunan dan dasar pengambilan keputusan.
3. **Fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan**, yang diampu **Bidang PPEPD**, isu penting yang muncul adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik bagi penyusunan perencanaan periode berikutnya. Pengukuran kinerja masih perlu diarahkan tidak hanya pada pencatatan tingkat realisasi, tetapi juga pada analisis penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan, efektivitas intervensi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusinya terhadap pencapaian outcome pembangunan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat digunakan secara nyata untuk melakukan perbaikan kebijakan, penyesuaian target, penyempurnaan program, dan penentuan prioritas pembangunan selanjutnya.
4. **Fungsi koordinasi perencanaan pembangunan antar pemangku kepentingan**, yang diampu **Bidang PPM, IPW,PSDA** masih terdapat isu terkait sinkronisasi perencanaan antara Bappeda dengan Perangkat Daerah maupun dengan dokumen perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan pemahaman, keterbatasan kapasitas teknis perencana, belum optimalnya pelaksanaan SOP, serta komitmen dari masing-masing pihak dapat memengaruhi konsistensi proses perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi yang tidak hanya dilakukan pada saat penyusunan dokumen, tetapi berlangsung secara berkelanjutan

sejak identifikasi permasalahan, perumusan kebijakan, penetapan program, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

5. **Fungsi penyediaan rekomendasi kebijakan**, yang diampu **Bidang PPEPD**, isu yang perlu diperhatikan adalah penguatan pemanfaatan data, hasil kajian, inovasi, serta evidence sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Hasil kajian dan evaluasi perlu didorong agar tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi yang operasional dan digunakan oleh pengambil kebijakan maupun Perangkat Daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.
6. **Fungsi kesekretariatan dan dukungan manajemen**, yang diampu **Sekretariat Bappeda** isu penting berkaitan dengan penguatan tata kelola internal, pengelolaan data dukung, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan, serta penerapan SOP secara konsisten. Ketersediaan SDM perencana yang kompeten menjadi faktor penting karena semakin kompleksnya kebutuhan perencanaan pembangunan menuntut kemampuan dalam pengolahan data, analisis kebijakan, pengukuran kinerja, evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan kapasitas SDM perlu disertai dengan pembagian tugas yang jelas, peningkatan kualitas proses bisnis, dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.

Selain isu pada masing-masing fungsi tersebut, terdapat **isu lintas bidang** yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu belum optimalnya integrasi data dan informasi perencanaan, belum seragamnya pemahaman terhadap indikator dan pengukuran kinerja, keterbatasan kompetensi teknis tertentu, serta perlunya peningkatan koordinasi internal dan eksternal. Perubahan regulasi yang relatif dinamis juga menuntut Bappeda untuk memiliki kemampuan adaptasi yang cepat agar kebijakan dan proses perencanaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penjabaran isu-isu penting pada masing-masing bidang/bagian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kota Batam tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh **kualitas data, kapasitas SDM, kualitas analisis, efektivitas koordinasi, pemanfaatan hasil evaluasi, konsistensi penerapan SOP, serta kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan seluruh tahapan manajemen pembangunan**. Isu-isu tersebut selanjutnya perlu menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, kebutuhan pengembangan kapasitas, penguatan tata kelola, serta program dan kegiatan Bappeda pada periode perencanaan berikutnya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Renja Tahun 2026 sebanyak 3 Program 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 20.644.271.106,00** (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Rupiah*).

Sedangkan pada perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 mengalami perubahan menjadi 3 Program 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 21.244.077.099,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah* dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1.

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
- 1.1

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- 1.1.1

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- 1.1.2

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 1.1.3

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.2.1

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan PD
- 1.2.2

Analisis Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- 1.3

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.3.1

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2.

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 2.1

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 2.1.1

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.1.2

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 2.1.3

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.1.4

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2.2

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- 2.2.1

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 2.2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.2.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
- 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 2.3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.3.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 3.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 3.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 3.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 3.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3.5.2 Pengadaan Mebel
- 3.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 3.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 3.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 3.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Adapun Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1) Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 772.043.600,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 727.263.400,00

2) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 255.834.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 230.445.000,00

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Subkegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp 267.002.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp 399.727.000,00.

2) Subkegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp 245.723.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp 275.236.000,00.

c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di kabupaten/Kota.

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp 47.369.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp 52.687.000,00.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 10.145.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 10.122.000,00

2) Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 63.786.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 78.032.500,00

- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 1) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp 70.075.600,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp 37.612.200,00.
 - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 14.300.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 15.363.800,00
 - 3) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 6.695.400,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 6.686.400,00
 - 4) Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 5.895.400,00 berkurang menjadi Rp. 5.886.400,00
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp 68.888.500,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp 88.110.500,00.
 - 2) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 16.170.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 16.168.000,00
 - 3) Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 64.913.500,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 48.528.500,00

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 93.672.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp 13.680.000,00.
 - 2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 81.196.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp 203.275.000,00.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 15.350.239.506,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 14.603.193.415,00
- 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 44.280.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 40.080.000,00
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 145.772.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 250.153.500,00
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 56.886.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp.0,00
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 18.258.800,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 17.535.800,00
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Peralatan Kantor
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 253.648.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 217.680.400,00.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 98.114.400,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 berkurang menjadi Rp. 68.360.300,00
 - 4) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 721.279.400,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 791.250.400
- e. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp.0,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 430.080.000,00
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Mebel
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 114.597.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 142.402.000,00
 - 3) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 448.465.600,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 560.040.600,00,00
 - 4) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 850.480.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 930.353.000,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 20.916.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 26.535.000,00

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 40.280.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 44.040.000,00

- 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 141.300.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 154.860.000,00

- 3) Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Semula pada Renja Tahun 2026 sebesar Rp. 62.138.000,00 pada perubahan Renja Tahun 2026 bertambah menjadi Rp. 564.781.584,00

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode							Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
											Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	5	1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						RENJA 2026	RANHIR P RENJA 2026		
1	5	1	1				PERENCANAAN						20.644.271.106,00	21.244.077.099	599.805.993	
	5	1	1	2.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip PD	Nilai Sakip PD	77.03	77.03	174.868.000,00	216.955.000	42.087.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
									Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93	93	18.444.660.706,00	18.919.351.999	474.691.293	
	5	1					Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evalnasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	174.868.000	216.955.000	42.087.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	5	1	1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	93.672.000	13.680.000	-79.992.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	81.196.000	203.275.000	122.079.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan: Persentase)	96,40%	100%	15.394.519.506	14.643.273.415	-751.246.091	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	61 orang/bulan	62 orang/bulan	15.350.239.506	14.603.193.415	-747.046.091	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	44.280.000	40.080.000	-4.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	202.658.000	250.153.500	47.495.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	12 orang	62 orang	145.772.000	250.153.500	104.381.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56.886.000	0	-56.886.000	

	5	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	1.124.735.600	1.128.261.900	3.526.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1 paket	1 paket	18.258.800	17.535.800	-723.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	4 paket	6 paket	253.648.000	217.680.400	-35.967.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1 paket	1 paket	33.435.000	33.435.000	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	2 paket	2 paket	98.114.400	68.360.300	-29.754.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	12 laporan	12 laporan	721.279.400	791.250.400	69.971.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	1.413.542.600	2.062.875.600	649.333.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 unit	-	430.080.000	430.080.000	
	5	1	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	15 Unit	26 Unit	114.597.000	142.402.000,00	27.805.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	30 unit	54 unit	448.465.600	560.040.600,00	111.575.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.07	7		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1 unit	1 unit	850.480.000	930.353.000	79.873.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	20.916.000	26.535.000	5.619.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12 laporan	12 laporan	20.916.000		5.619.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan: Persentase)	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan: Persentase)	100%	100%	288.289.000	26.535.000 808.252.584	519.963.584	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	1 unit	1 unit	40.280.000	44.040.000	3.760.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	4 unit	4 unit	141.300.000	154.860.000	13.560.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	65 unit	65 unit	44.571.000	44.571.000	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	1 unit	1 unit	62.138.000	564.781.584	502.643.584	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	2	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100%	100%	560.094.000	727.650.000	167.556.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
									Persentase Komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Komponen masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	1.114.386.400	1.044.217.200	-70.169.200	
		5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)	Persentase penyusunan dokumen sesuai dengan tahapan dan tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	1.114.386.400	1.044.217.200	-70.169.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Berita Acara)	45 Berita Acara	45 Berita Acara	86.508.800	86.508.800	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2.01	5		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)	1 Berita Acara	1 Berita Acara	772.043.600	727.263.400	-44.780.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2.01	7		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	255.834.000	230.445.000	-25.389.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5	1	2	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)	Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	512.725.000	674.963.000	162.238.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2.02	2		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan: Orang)	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan: Orang)	1 Dokumen	1 Dokumen	245.723.000	275.236.000	29.513.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan: Dokumen)	200 orang	200 orang	267.002.000	399.727.000	132.725.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2.03			Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	47.369.000	52.687.000	5.318.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	2	2.03	1		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	3 laporan	3 laporan	47.369.000	52.687.000	5.318.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5	1	3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PFM (Dengan Satuan: Nilai)	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran bidang PFM (Dengan Satuan: Nilai)	24,03	24,03	88.363.600	102.587.100	14.223.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
									rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Nilai)	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Nilai)	23,71	23,71	96.966.400	65.548.800	-31.417.600	
									rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Nilai)	rata-rata nilai SAKIP Perencanaan dan Pengukuran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Nilai)	22,94	22,94	164.932.000	167.767.000	2.835.000	
	5	1	3	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	88.363.600	102.587.100	14.223.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5	1	3	2.01	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	22 dokumen	22 dokumen	10.145.000	10.122.000	-23.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.01	4		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	1 laporan	1.232.600	1.232.600	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.01	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	13.200.000	13.200.000	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.01	8		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	1 laporan	63.786.000	78.032.500	14.246.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5	1	3	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Persen)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	96.966.400	65.548.800	-31.417.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.02	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	14 dokumen	14 dokumen	70.075.600	37.612.200	-32.463.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.02	4		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	1 laporan	14.300.000	15.363.800	1.063.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.02	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	6 dokumen	6 dokumen	6.695.400	6.686.400	-9.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	5	1	3	2.02	8		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA(Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA(Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	1 laporan	5.895.400	5.886.400	-9.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Persen)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	164.932.000	167.767.000	2.835.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.03	1		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	10 Dokumen	10 Dokumen	14.960.000	14.960.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.03	4		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	68.888.500	88.110.500	19.222.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

									(Dengan Satuan: Laporan)	(Dengan Satuan: Laporan)						
	5	1	3	2.03	5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	26 dokumen	26 dokumen	16.170.000	16.168.000	-2.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	1	3	2.03	8		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan: Laporan)	1 laporan	1 laporan	64.913.500	48.528.500	-16.385.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang

bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD